



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP 2025



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KOTA BOGOR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berkaitan dengan Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada pemerintah (Provinsi dan Pusat) serta masyarakat pada umumnya.

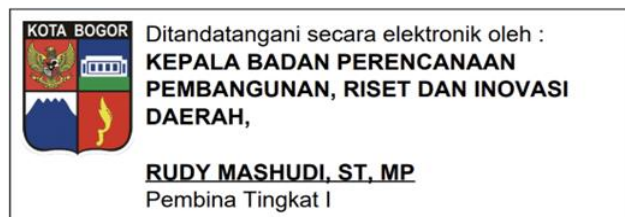
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025–2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Laporan Kinerja Nomor 4614), berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam

penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan target kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Bogor, 25 Februari 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi instansi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2025 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja Perangkat Daerah secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana pengukuran sasaran strategis yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor pada tahun 2025 telah berhasil dicapai. Pada tahun 2025 persentase rata-rata tingkat ketercapaian IKU Bapperida sebesar 99,11%, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	89.88	90.90	101.13	Sangat Baik
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90.5	93.01	102.77	Sangat Baik
		Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	Persen	95	91.35	96.16	Sangat Baik
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	95.00	95.00	Sangat Baik
		Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)	Inovasi/ Tahun/PD	1	1	100.00	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Niali	25.05	25.12	100.28	Sangat Baik
		Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	24.55	24,54	99.96	Sangat Baik
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	10	16.15	161.50	Sangat Baik
		Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Persen	10	14.29	142.90	Sangat Baik
		Persentase inovasi yang berkelanjutan	Persen	72	73.46	102.03	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Ketercapaian						99.11	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dari Ke 10 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator kinerja yang tingkat capaiannya $\geq 100\%$, 3 indikator kinerja yang < 100 . Selanjutnya berdasarkan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang di turunkan dari hasil penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Tahun 2025-2026, yang memuat anggaran Program yang mendukung untuk pencapaian sasaran Bapperida pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah Kota Bogor Berdasarkan Pencapaian Kinerja
Tahun 2025**

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.478.650.272	18.327.831.530	94,09
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.344.562.400	1.275.246.800	94,84
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.838.138.200	1.768.606.800	96,22
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	1.110.621.100	1.031.142.177	92,84
TOTAL			23.771.971.972	22.402.827.307	94,24

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian untuk 3 sasaran strategis didukung oleh 4 Program dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 23.771.971.972, dengan realisasi sebesar Rp. 22.402.827.307 (94,24%).

Dari hasil evaluasi pada setiap sasaran menunjukan beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian bagi Bapperida Kota Bogor ke depan yaitu untuk lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian tujuan yang telah di tetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor tahun 2025-2026. Berkaitan dengan hasil evaluasi tersebut maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dan Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2025.

2. Melaksanakan penyelarasan dalam penyusunan logical frame work dan penjenjangan kinerja Tingkat Kota dan penjenjangan kinerja tingkat Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
3. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan dokumen RKPD tahun 2027 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun 2026 dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2026.
4. Secara internal melakukan perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bidang sehingga proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta pelaporan lingkup Bapperida dapat terlaksana dengan optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bapperida Kota Bogor ini, diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk menilai hasil pelaksanaan kinerja Bapperida Kota Bogor serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil Keputusan dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan di tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	III
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM BAPPERIDA KOTA BOGOR	2
1) <i>Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah</i>	2
2) <i>Data Pegawai</i>	3
3) <i>Cascading Kinerja</i>	4
4) <i>Peta Proses Bisnis</i>	4
5) <i>Isu Strategis</i>	5
6) <i>Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025</i>	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. PERENCANAAN STATEGIS	9
B. PERJANJIAN KINERJA	10
C. RENCANA ANGGARAN	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
1) <i>Sasaran Strategis Meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor</i>	18
1.1 Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah	19
1.2 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah	21
1.3 Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)	23
1.4 Kepatuhan Pegeloaan Keuangan	25
1.5 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	28
2) <i>Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	30
2.1 Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja	31
2.2 Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	33
3) <i>Sasaran Strategis Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah</i>	35
3.1 Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	35
3.2 Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	37
3.3 Persentase Inovasi yang Berkelanjutan	38
B. ANALISIS EFISIENSI	40
BAB IV PENUTUP.....	44
A. KESIMPULAN	45
B. RENCANA TINDAK LANJUT	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pegawai Bapperida Tahun 2025	3
Tabel 2 Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bapperida Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan	6
Tabel 3 Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025	8
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor	11
Tabel 5 Rencana Belanja dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025	12
Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 7 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025	15
Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024, Akhir Renstra, Provinsi, dan Nasional.....	17
Tabel 12 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2024	40
Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025	43
Tabel 14 Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi	2
Gambar 2 Cascading Kinerja Bapperida	4
Gambar 3 Peta Proses Bisnis	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2024 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapperida Kota Bogor kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Bapperida Kota Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKIP Bapperida Kota Bogor dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Bapperida Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian

sasaran dan target kinerja utama Bapperida Kota Bogor Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

C. Gambaran Umum Bapperida Kota Bogor

1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Dasar Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor adalah Peraturan Wali Kota Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Di dalamnya disebutkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor adalah unsur penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Bogor.

Struktur Organisasi Bapperida Kota Bogor sebagaimana Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, dapat disajikan dalam gambar berikut ini :

Gambar 1



Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
Gambar 1 Struktur Organisasi

2) Data Pegawai

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di tahun 2025, jumlah pegawai Bapperida Kota Bogor sebanyak 47 orang yang terdiri dari 43 orang PNS, 1 orang CPNS, 3 orang P3K, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1
Pegawai Bapperida Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Kondisi SDM Sampai 2024			Kebutuhan SDM (Orang)	Selisih Kebutuhan SDM (Orang)
		PNS	P3K	Total ASN		
A	Jabatan Struktural					
1	Kepala	1	0	1	1	0
2	Sekretaris	1	0	1	1	0
3	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	1	1	0
4	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	1	0	1	1	0
5	Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	1	0	1	1	0
6	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah	1	0	1	1	0
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	1	1	0
TOTAL				7	7	0
B	Jabatan Fungsional					
1	Perencana Ahli Utama	0	0	0	2	2
2	Perencana Ahli Madya	3	0	3	7	4
3	Perencana Ahli Muda	17	0	17	17	0
4	Perencana Ahli Pertama	3	0	3	21	18
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	0	0	0	2	2
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	2	0	2	3	1
7	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	0	0	0	1	1
8	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	1	0	1	1	0
9	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1	2	1
10	Pranata Komputer Ahli Pertama	0	3	3	3	0
11	Arsiparis Terampil	0	0	0	2	2
12	Arsiparis Mahir	0	0	0	2	2
13	Arsiparis Penyelia	0	0	0	2	2
14	Arsiparis Ahli Pertama	0	0	0	2	2
15	Peneliti Madya	0	0	0	3	3
16	Peneliti Muda	0	0	0	2	2
17	Peneliti Pertama	0	0	0	3	3
18	Statistisi Pertama	0	0	0	1	1
19	Statistisi Muda	0	0	0	1	1
TOTAL				30	77	47
C	Jabatan Pelaksana					
1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	0	7	34	27
2	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1	10	9
3	Pengelola Layanan Operasional	0	0	0	1	1
4	Pengadministrasi Perkantoran	2	0	2	4	2
TOTAL				10	49	39
JUMLAH TOTAL				47	133	86

Tabel 1 Pegawai Bapperida Tahun 2025

Dari data pada tabel di atas dapat kita lihat jika jumlah kekurangan pegawai Bapperida Kota Bogor masih banyak yaitu 86 orang, dimana jumlah kebutuhan seharusnya sebanyak 133 orang, yang baru dapat dipenuhi

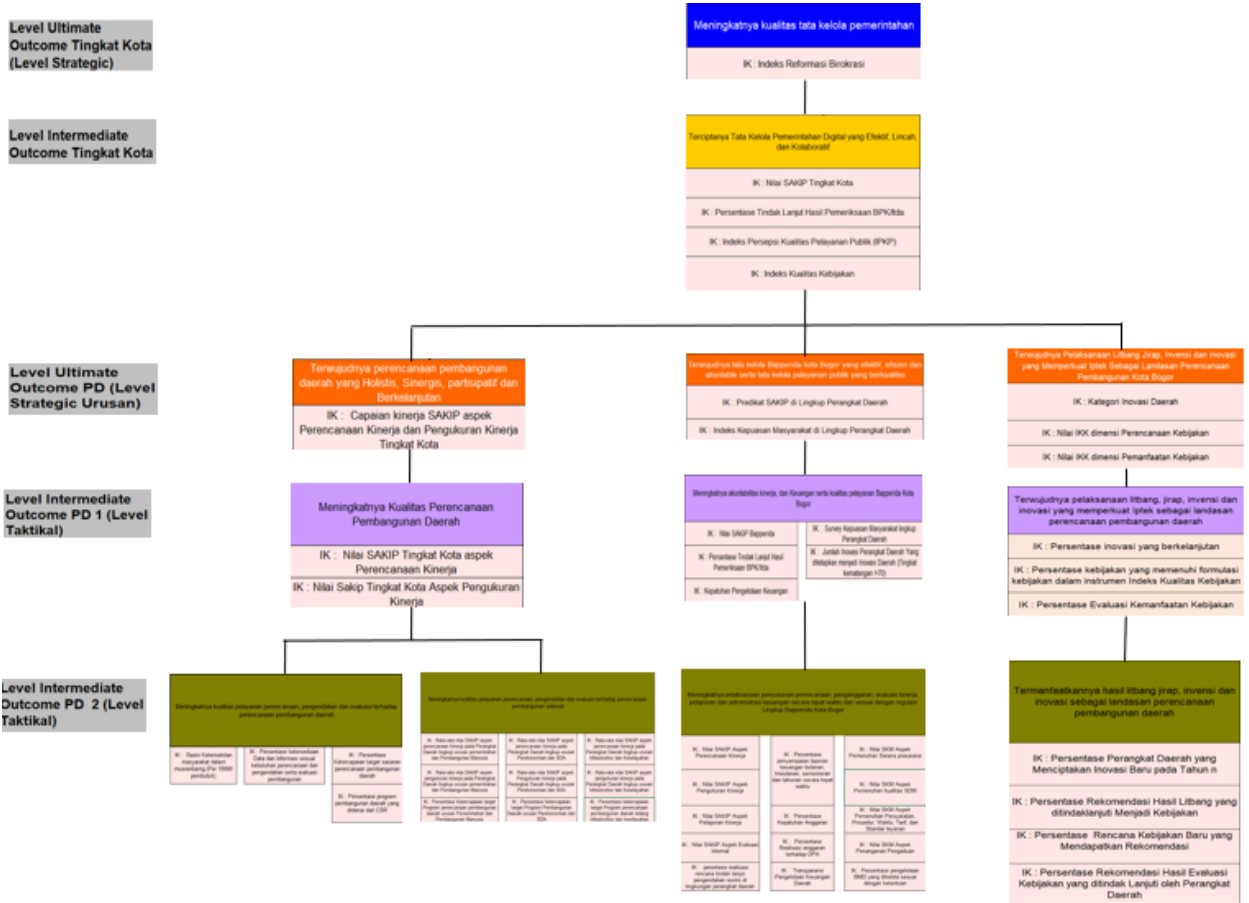
LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 2025 3

sebanyak 47 orang, kekurangan pegawai tersebut untuk saat ini masih diisi dengan tenaga Non ASN sebanyak 11 orang yang tersebar di berbagai bidang.

3) Cascading Kinerja

Dalam mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran Pemerintah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor menyusun cascading kinerja sebagai berikut :

Gambar 2
Cascading Kinerja Bapperida

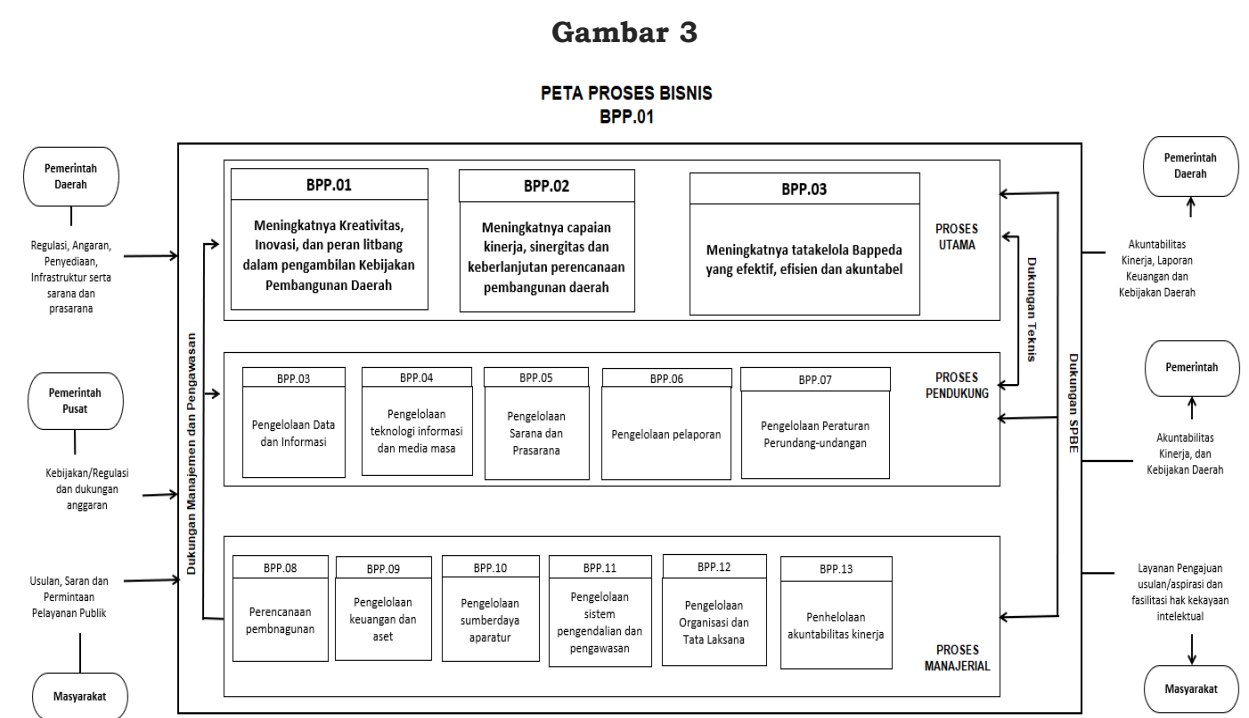


Gambar 2 Cascading Kinerja Bapperida

4) Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Demi terwujudnya hubungan kinerja yang efektif dan efisien maka telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Nomor 000.8.3.1/13 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis di

Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.



Gambar 3 Peta Proses Bisnis

5) Isu Strategis

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025-2026, terdapat 4 (empat) Isu Strategis yaitu:

- 1) Penguatan Logika Framework, Analisis Data dan Informasi serta perumusan manajemen resiko dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Penguatan monitoring dan evaluasi serta pengendalian kinerja pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- 3) Penguatan ekosistem riset dan inovasi Daerah;
- 4) Penguatan SDM, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi.

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dapat dijelaskan pada table berikut ini.

Tabel 2

Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bapperida Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD)	Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
		Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
2	Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)	
3	Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;	
4	Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;	
5	Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;	
6	Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;	
7	Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatan, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);	
8	Belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
9	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja
10	Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;	
11	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang	
12	Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;	Penguatan perencanaan partisipatif
13	Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;	Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2 Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bapperida Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

6) Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

LKIP Bappeda Kota Bogor Tahun 20256

Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 700/25/VII-LHE/2025/Itda Tanggal 04 Juli 2025 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bogor, terdapat kelemahan atas evaluasi dan rekomendasi yang kemudian disusun rencana tindak lanjutnya yaitu:

Tabel 3
Rencana Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	KOMPONEN EVALUASI	KELEMAHAN ATAS HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKLANJUT	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT ATAS KELEMAHAN	BUKTI DUKUNG
1	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	Target dalam perencanaan kinerja tahun berjalan (Semester I Tahun 2025) belum seluruhnya dicapai dengan baik berdasarkan laporan kinerja sub kegiatan pada aplikasi SIABANG (Sistem Informasi Administrasi Pembangunan) dimana target capaian sebesar 20,8 namun terealisasi 15,57 sehingga capaian kinerjanya sebesar 74,86% dan capaian realisasi anggaran sebesar 72,72%	Melaksanakan rencana aksi beserta target yang telah ditetapkan pada kinerja berjalan secara optimal dan Memastikan target tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan	Melakukan evaluasi atas target sasaran yang tidak tercapai pada tahun 2024 dan melakukan upaya upaya alternatif serta monitoring yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan kinerja untuk pencapaian target sasaran di tahun berikutnya	Melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2024 dan merumuskan permasalahan dan isu strategis yang di tuangkan dalam BAB II Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
					Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk peraikan kinerja urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan yang dituangkan dalam BAB III Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
					Merumuskan target kinerja sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perbaikan kinerja urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan yang tertuang pada BAB IV Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
					Mengembangkan inovasi yang mendukung perbaikan kinerja tugas pokok fungsi bapperida yang tertuang pada BAB II Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
2	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan, dari 6 IKU tahun 2024, terdapat 2 IKU yang tidak tercapai yaitu : Nilai hasil evaluasi perencanaan kinerja dari hasil penilaian SAKIP tingkat Kota, dengan capaian 93,96% dan persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target dengan capaian 83,46%	Memastikan data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan dengan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi dan capaian target IKU secara berkala serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja pada tahun berkenaan dan tahun berikutnya	Melaksanakan evaluasi rencana aksi dan capaian target IKU secara berkala melalui pelaporan realisasi bulanan SIABANG, pelaporan realisasi triwulanan RKPD, dan pelaporan realisasi triwulanan SKP secara berjenjang	Realisasi Bulanan SIABANG	https://drive.google.com/drive/folders/1TwlYM4PrQ6x5Cr0SAa_rhnrKDghUy4ER?usp=drive_link
					Realisasi Triwulanan RKPD	https://drive.google.com/drive/folders/1wFkkZV7KTbv-BKKJK4G-9elbgNJPSoHM?usp=drive_link
					Realisasi SKP Triwulanan	https://drive.google.com/drive/folders/1cwfiD9BrxrH94cc55lmIz2PBRvpB24w7?usp=sharing

No	KOMPONEN EVALUASI	KELEMAHAN ATAS HASIL EVALUASI	REKOMENDASI	RENCANA TINDAKLANJUT	MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT ATAS KELEMAHAN	BUKTI DUKUNG
3	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	Penyajian laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkapkan informasi yang memadai untuk setiap indikator kinerja utama yaitu belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	Meningkatkan Kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014, dengan memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya	Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025 sesuai dengan peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014, dengan memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya	laporan LKIP tahun 2024 telah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2023	https://drive.google.com/file/d/1iRe5RMp7Z821iQL3m2sekG25_g04HxRM/view?usp=drive_link
					laporan LKIP tahun 2024 akan disusun dengan memuat perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	https://drive.google.com/drive/folders/1vgkylh1vxwSpXZgXbe2P5RGipGDv3Sp-
4	Evaluasi Atas Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum seluruhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja, dimana masih terdapat 2 (dua) IKU yang tidak tercapai yaitu: Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari Hasil Penilaian SAKIP Tingkat Kota, dengan capaian 93,96% dan Persentase Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah yang Mencapai Target dengan capaian 83,46%	Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan melakukan evaluasi terhadap rencana aksi dan capaian IKU secara berkala	Melakukan evaluasi atas target sasaran yang tidak tercapai pada tahun 2024 dan melakukan upaya upaya alternatif serta monitoring yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan kinerja untuk pencapaian target sasaran di tahun berikutnya	Melaksanakan evaluasi kinerja tahun 2024 dan merumuskan permasalahan dan isu strategis yang di tuangkan dalam BAB II Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
					Merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk peraikan kinerja urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan yang dituangkan dalam BAB III Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
					Merumuskan target kinerja sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung perbaikan kinerja urusan perencanaan, dan penelitian dan pengembangan yang tertuang pada BAB IV Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link
					Mengembangkan inovasi yang mendukung perbaikan kinerja tugas pokok fungsi bapperida yang tertuang pada BAB II Renstra Bapperida Tahun 2025-2029	https://drive.google.com/file/d/1bjuZlcc_H63cwA8Y2s_XaONIfkq8_Zwm/view?usp=drive_link

Tabel 3 Rencana Tindakanlanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025-2026, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor menjalankan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan dalam RPD Tahun 2025-2026 mendukung tujuan **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, yang kemudian diturunkan dalam sasaran strategis **Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif**, yang kemudian dijabarkan kembali dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor menjadi 3 tujuan, 3 sasaran sebagai berikut:

Tujuan RPD Kota Bogor
“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan”

Tujuan RPD	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		
Indikator Tujuan RPD	Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran RPD	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif		
Indikator Sasaran RPJMD	Nilai SAKIP Tingkat Kota		
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda		
	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)		
	Indeks Kualitas Kebijakan		
Tujuan Reastra	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, partisipatif dan Berkelanjutan	Terwujudnya tata kelola Bapperida kota Bogor yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Terwujudnya tata kelola Bapperida kota Bogor yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas
Indikator Tujuan Reastra	Capaian kinerja SAKIP aspek Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja Tingkat Kota	Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai IKK dimensi Perencanaan Kebijakan Nilai IKK dimensi Pemanfaatan Kebijakan Kategori Inovasi Daerah
Sasaran Reastra	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan serta kualitas pelayanan Bapperida Kota Bogor	Terwujudnya pelaksanaan litbang, jipap, inovasi dan inovasi yang memperkuat lptek sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Sasaran Reastra	Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Nilai SAKIP Bapperida	Persentase inovasi yang berkelanjutan
	Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat kematangan >100)	

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara pimpinan dan staf untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan suatu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025. Dari hasil pelaksanaan evaluasi capaian tahun sebelumnya terdapat perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025, dimana terdapat perubahan target IKU Bapperida sehingga dilakukan perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dibuat sebagai

bentuk komitmen pimpinan dalam pencapaian target kinerja pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				AWAL	PERUBAHAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	89.88	89.88
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90.37	90.5
		Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	Persen	95	95
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	100
		Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)	Inovasi/ Tahun/PD	1	1
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Niali	25.05	25.05
		Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	24.55	24.55
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	10	10
		Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Persen	10	10
		Persentase inovasi yang berkelanjutan	Persen	70	72

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor

C. RENCANA ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.771.971.972.- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp. 22.402.827.307 atau capaian sebesar 94,24%, Secara rinci Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Rencana Belanja dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.478.650.272	18.327.831.530	94.09
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.344.562.400	1.275.246.800	94.84
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.838.138.200	1.768.606.800	96.22
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	1.110.621.100	1.031.142.177	92.84
TOTAL			23.771.971.972	22.402.827.307	94.24

Tabel 5 Rencana Belanja dan Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilakukan melalui pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yaitu pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai berikut:

Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Tabel 6 Skala Nilai Peringkat Kinerja

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor tercermin dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Renstra/Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di tetapkan kembali dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Capaian kinerja tersebut merupakan buah dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran rata-rata capaian IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7
Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	89.88	90.90	101.13	Sangat Baik
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90.5	93.01	102.77	Sangat Baik
		Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	Persen	95	91.35	96.16	Sangat Baik
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	95.00	95.00	Sangat Baik
		Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)	Inovasi/ Tahun/PD	1	1	100.00	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Niali	25.05	25.12	100.28	Sangat Baik
		Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	24.55	24,54	99.96	Sangat Baik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	10	16.15	161.50	Sangat Baik
		Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Persen	10	14.29	142.90	Sangat Baik
		Persentase inovasi yang berkelanjutan	Persen	72	73.46	102.03	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Ketercapaian						99.11	Sangat Baik

Tabel 7 Data Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025

- Cara perhitungan:
1. Berdasarkan LHE SAKIP Dari Inspektorat Daerah Kota Bogor.
 2. Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Layanan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Sesuai Amanat Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
 3. Persentase Penilaian atas kepatuhan pengelolaan keuangan yang terealisasi di bagi target Penilaian atas kepatuhan pengelolaan keuangan x 100.
 4. Persentase tindak lanjut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diimplementasikan dengan total jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa baik entitas mematuhi saran atau rekomendasi yang diaudit.
 5. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dihasilkan dalam satu tahun.
 6. Menyesuaikan LHE SAKIP Tingkat Kota dari KemenPAN RB.
 7. Menyesuaikan LHE SAKIP Tingkat Kota dari KemenPAN RB.
 8. Jumlah kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan dibagi jumlah kebijakan x 100%.
 9. Jumlah kebijakan tahun n2 yang dievaluasi dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan pada tahun n -2 x 100%.
 10. Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang di terapkan lebih dari 2 tahun dibagi jumlah seluruh inovasi Perangkat Daerah komulatif dari tahun 2014 sampai tahun ke n x 100%.

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian IKU Bapperida sebesar **99,11%** atau **”Sangat Baik”**, dimana dari 10 target IKU yang telah di tetapkan pada perjanjian kinerja terdapat sebanyak 6 indikator kinerja yang capaian kinerjanya $\geq 100\%$ dan sebanyak 3 indikator kinerja yang capaian kinerjanya $< 100\%$. Indikator kinerja utama yang capaiannya tertinggi adalah Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan sebesar 161,5% (Sangat Tinggi), sedangkan yang paling rendah adalah Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda sebesar 95% (Sangat Tinggi), jika dibandingkan dengan capaian tahun – tahun sebelumnya , tidak semua pencapaian di tahun 2025 dapat di perbandingkan dengan tahun sebelumnya, karena tahun di tahun 2025 sudah menggunakan Renstra Bapperida 2025 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) kota Bogor Tahun 2025 – 2026, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024, Akhir Renstra, Provinsi, dan Nasional

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTAR (%)	REALISASI PROVINSI	RATA-RATA REALISASI NASIONAL
Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	89.88	80.45	88.75	89.5	90.9	101.13	90.81	100.10	89.98	64.89
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90.5	82.98	89.48	90.48	93.01	102.77	91.28	101.90	N/A	N/A
Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Persen	95	N/A	N/A	N/A	91.35	96.16	95	96.16	N/A	N/A
Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	100	100	95	95	95.00	100	95.00	N/A	N/A
Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)	Inovasi/ Tahun/PD	1	N/A	N/A	1	1	100.00	1	100.00	N/A	N/A
Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Niali	25.05	24.3	24.55	24.93	25.12	100.28	25.3	99.29	27.38	N/A
Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	24.55	23.7	24.05	24.43	24.54	99.96	24.85	98.75	26.65	N/A

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN TAHUN 2025 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTAR (%)	REALISASI PROVINSI	RATA-RATA REALISASI NASIONAL
Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	10	N/A	N/A	N/A	16.15	161.50	10	161.50	N/A	N/A
Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Persen	10	N/A	N/A	N/A	14.29	142.90	10	142.90	N/A	N/A
Persentase inovasi yang berkelanjutan	Persen	72	N/A	N/A	69.92	73.46	102.03	73	100.63	N/A	N/A

Tabel 8 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun 2024, Akhir Renstra, Provinsi, dan Nasional

Cara perhitungan:

1. Berdasarkan LHE SAKIP Dari Inspektorat Daerah Kota Bogor.
2. Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Layanan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Sesuai Amanat Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Presentase Penilaian atas kepatuhan pengelolaan keuangan yang terealisasi di bagi target Penilaian atas kepatuhan pengelolaan keuangan x 100.
4. Persentase tindak lanjut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diimplementasikan dengan total jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa baik entitas mematuhi saran atau rekomendasi yang diaudit.
5. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang dihasilkan dalam satu tahun.
6. Menyesuaikan LHE SAKIP Tingkat Kota dari KemenPAN RB.
7. Menyesuaikan LHE SAKIP Tingkat Kota dari KemenPAN RB.
8. Jumlah kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan dibagi jumlah kebijakan x 100%.
9. Jumlah kebijakan tahun n2 yang dievaluasi dibagi jumlah kebijakan yang ditetapkan pada tahun n -2 x 100%.
10. Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang di terapkan lebih dari 2 tahun dibagi jumlah seluruh inovasi Perangkat Daerah komulatif dari tahun 2014 sampai tahun ke n x 100%.

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja tahun 2025 jika di bandingkan dengan target kinerja yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025-2026, terdapat beberapa realisasi indikator yang sudah mencapai target, untuk penjelasa masing-masing sasaran strategis sebagai berikut :

1) **Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor**

Sasaran strategis ini diukur dengan 5 indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah, Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah, Kepatuhan Pengelolaan Keuangan, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda, dan Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100), dalam pencapaiannya di dukung oleh 1 Program dan 6 Kegiatan yaitu:

Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bapperida
Indikator Sasaran	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah
	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah
	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda
	Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)
Program	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Program	Nilai SAKIP Aspek Perencanaan Kinerja
	Nilai SAKIP Aspek Pengukuran Kinerja
	Nilai SAKIP Aspek Pelaporan Kinerja
	Nilai SAKIP Aspek Evaluasi Internal
	Persentase realisasi rencana tindak lanjut pengendalian risiko di lingkungan perangkat daerah
	Persentase Penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran, dan tahunan secara tepat waktu
	Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan
	Persentase kepatuhan penganggaran
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan
	Rata - rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

1.1 Nilai SAKIP Lingkup Perangkat Daerah



Pencapaian target nilai SAKIP di lingkungan Perangkat Daerah merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkup Bapperida Kota Bogor, karena SAKIP merupakan sistem yang dirancang untuk mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah, selain itu SAKIP juga merupakan mekanisme yang digunakan untuk mendorong instansi pemerintah agar lebih bertanggung jawab dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur beberapa beberapa elemen kunci yang saling terkait yaitu perencanaan Kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor tahun 2025 Nomor 700/25/VII-LHE/2025/Itda, tanggal 4 Juli 2025, capaian Nilai SAKIP Bapperida Kota Bogor sebesar **101.13%** dari target 89.88 poin dengan realisasi sebesar **90.90** poin atau kategori **“AA” (Sangat Memuaskan)** dari target yang telah di tetapkan sebesar 89.88 poin. Realisasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar **1.4** poin, dimana pada tahun 2024 realisasinya sebesar 89.50 poin. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), realisasi tahun 2025 telah melebihi capaian target yang telah di

tetapkan pada tahun akhir tahun sebesar **1.02** poin, dimana target di akhir tahun Renstra sebesar 89.88 poin. Apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor, realisasi nilai SAKIP Bapperida Kota Bogor masih berada di atas nilai rata-rata nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor dimana nilai rata-ratanya sebesar 87.52 poin, dan jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Kota Bogor, nilai SAKIP Bapperida masih lebih tinggi **11.94** poin dimana nilai SAKIP Kota Bogor sebesar 78.96 poin. Selanjutnya jika dibandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat, nilai SAKIP Kota Bogor masih lebih tinggi **0.92** poin dimana nilai SAKIP Provinsi Jawa Barat sebesar 89.98 poin dan jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi nilai AKIP Nasional, realisasi AKIP Bapperida lebih tinggi dari rata-rata Nasional sebesar **26.01** poin, dimana nilai rata-rata nasional sebesar 64.89 poin.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian nilai AKIP Bapperida Kota Bogor tahun 2025 adalah adanya peningkatan pada beberapa komponen evaluasi dari 4 komponen penilaian yaitu komponen evaluasi perencanaan kinerja dimana mengalami peningkatan dari 27.60 poin pada tahun 2024 menjadi 28.50 poin di tahun 2025 dengan peningkatan sebesar 0.9 poin, dan peningkatan pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal dimana mengalami peningkatan dari 20.50 poin pada tahun 2024 menjadi 22.50 poin di tahun 2025 dengan peningkatan sebesar 2 poin. Sedangkan faktor yang menghambat pencapaian nilai AKIP Bapperida tahun 2025 adalah tidak tercapainya komponen penilaian evaluasi pengukuran kinerja dimana mengalami penurunan dari 27.60 poin pada 2024 menjadi 26.10 poin di tahun 2025 dengan penurunan sebesar 1.5 poin, penurunan itu disebabkan karena terdapat 2 capaian IKU Bapperida yang capaiannya <100%.

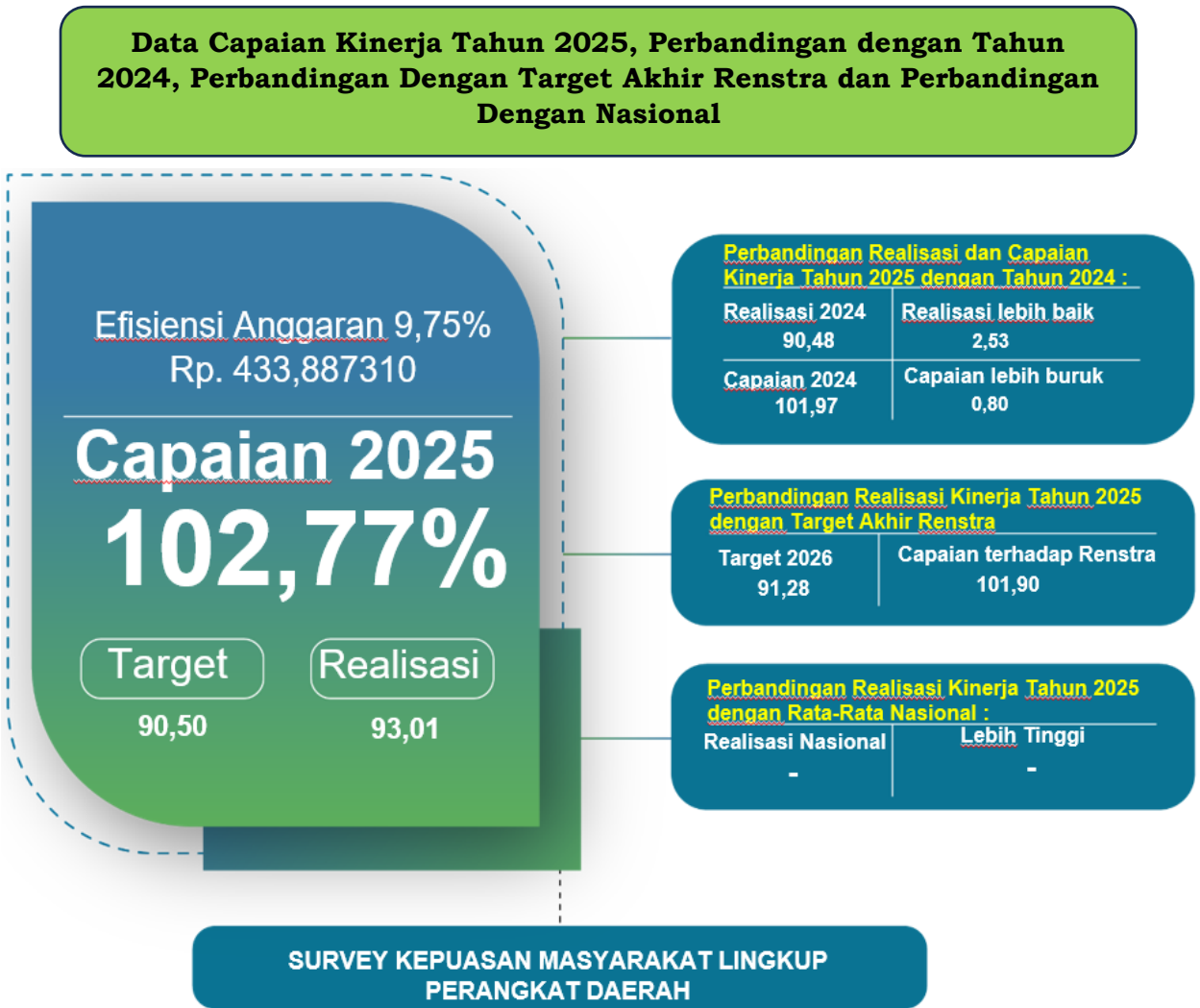
Dalam rangka akselerasi kinerja nilai SAKIP di lingkungan Perangkat Daerah tahun 2026 diperlukan perbaikan-perbaikan dari hasil rekomendasi yang tertuang dalam LHE AKIP Bapperida Tahun 2025 yaitu :

1. Melakukan evaluasi atas target sasaran yang tidak tercapai pada tahun 2024 dan melakukan upaya-upaya alternatif serta monitoring yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan kinerja untuk pencapaian target sasaran di tahun berikutnya.
2. Melaksanakan evaluasi rencana aksi dan capaian target IKU secara berkala melalui pelaporan realisasi bulanan SIABANG, pelaporan realisasi triwulanan RKPD, dan pelaporan realisasi triwulanan SKP secara berjenjang.
3. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2025 sesuai dengan peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014, dengan memuat

perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun tahun sebelumnya.

Pencapaian nilai SAKIP di lingkungan Perangkat Daerah 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 21.406.300 dengan realisasi sebesar Rp. 21.104.600, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 1.41% atau setara dengan Rp. 301.700.

1.2 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Perangkat Daerah



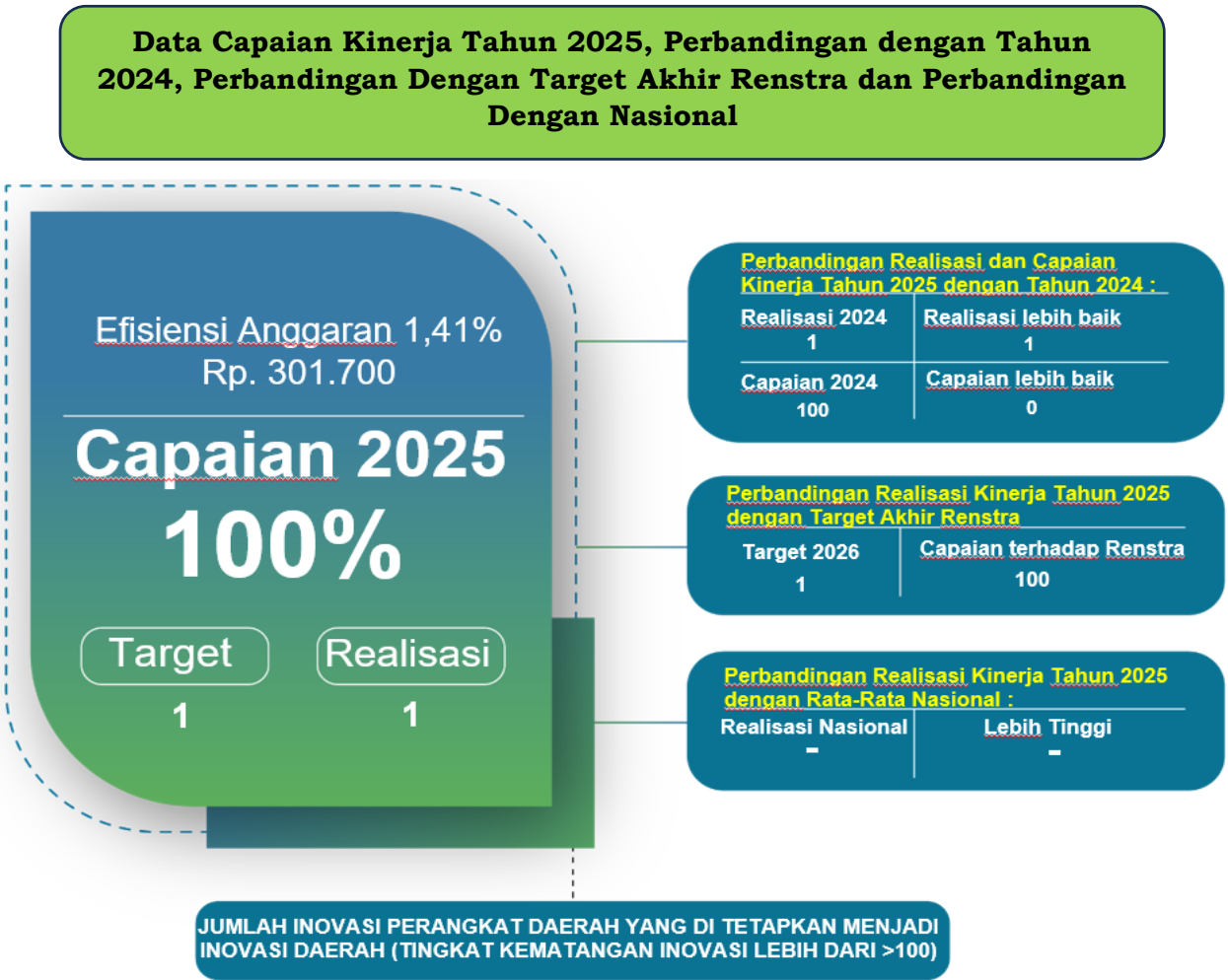
Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) lingkup Perangkat Daerah merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkup Bapperida Kota Bogor, dimana SKM berfungsi sebagai alat ukur eksternal (persepsi publik) atas kinerja yang telah dipertanggungjawabkan secara internal, hasil survei yang telah dilaksanakan nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi, serta memastikan kinerja pemerintahan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari hasil pengukuran SKM terhadap pelayanan Bapperida yang dilaksa secara periodik selama tahun 2025 dari bulan Januari

2025 s.d. Oktober 2025 yang mengandung dengan 9 unsur pertanyaan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor, menghasilkan capaian kinerja Bapperida pada tahun 2025 sebesar **102.77%** dari target 90.95 poin dengan realisasi nilai SKM sebesar **93.01** poin atau kategori **Sangat Baik** dari target yang telah ditetapkan sebesar 90.50 poin. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun 2024 sebesar **2.53** poin dimana nilai SKM pada tahun 2024 sebesar 90.48 poin. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian SKM Bapperida telah melebihi target sebesar **101.90%** dimana target di akhir tahun Renstra sebesar 91.28 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan nilai SKM Kota Bogor, nilai SKM Bapperida masih lebih tinggi **0.49** poin dari nilai SKM Kota Bogor dimana nilai SKM Kota Bogor sebesar 92.52. Nilai SKM Bapperida tidak dapat dibandingkan dengan rata-rata nilai SKM Provinsi Jawa Barat dan rata-rata nilai SKM Nasional dikarenakan hingga laporan ini disusun tidak terdapat publikasi rata-rata nilai SKM Provinsi Jawa Barat dan rata-rata nilai SKM Nasional.

Faktor keberhasilan yang mendukung tercapainya Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah yaitu adanya komitmen dari seluruh pegawai Bapperida untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, komitmen ini dibuktikan dengan adanya penandatanganan pakta integritas dan ditindak lanjutinya setiap saran dan masukan dari pengguna layanan. Sedangkan faktor yang menjadi masalah dalam SKM ini dari 9 unsur pertanyaan adalah unsur waktu pelayanan, dimana unsur tersebut merupakan unsur dengan nilai terendah dari 9 unsur lainnya. Dalam rangka mengakselerasi kinerja Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah tahun 2026 diperlukan evaluasi kembali terhadap standar pelayanan dan standar operasional yang telah ditetapkan serta menindaklanjuti masukan dan saran dari para pengguna layanan.

Capaian kinerja Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah didukung oleh 4 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.451.338.600 dengan realisasi sebesar Rp. 4.017.451.290, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 9.75% atau setara dengan Rp. 433.887.310.

1.3 Jumlah inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)



Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Lingkup Bapperida Kota Bogor, karena inovasi dapat meningkatkan efisiensi dan evektifitas, mendorong optimalisasi sumber daya, dan menciptakan transparansi dalam pelayanan publik. Dari hasil pengukuran Inovasi yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI. Capaian indikator pada tahun 2025 sebesar **100%** dengan realisasi sebanyak 1 inovasi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 inovasi. Pada tahun 2025 dari 4 Inovasi pada Bapperida Kota Bogor yang mendapatkan nilai kematangan >100 pada tahun 2025 sebanyak **1** inovasi yaitu **“Bogor Innovation Award”** dengan nilai kematangan sebesar **103** poin, sedangkan nilai kematangan 3 Inovasi lainnya masih <100, dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Nilai Kematangan Inovasi Bapperida Tahun 2025

NO	NAMA INOVASI	NILAI KEMATANGAN
1	BIA (Bogor Innovation Award)	103
2	Kampung Nol Kemiskinan Ekstrem	87
3	BEBERES RUNTAH (Bersama Bereskan Sampah di Rumah untuk Kota Lebih Sehat)	30
4	SIMANJA (Sistem Informasi Manajemen Kinerja)	0

Nilai Kematangan Inovasi Bapperida Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) di tahun 2025 masih sama dengan capaian pada tahun 2024 yaitu 100% dengan realisasi sebanyak 1 inovasi, meskipun sama nilai kematangan pada inovasi Bogor Innovation Award mengalami kenaikan sebanyak 1 poin, dimana nilai kematangan pada tahun 2024 sebesar 102 poin. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) telah mencapai target sebesar **100%** dimana target di akhir tahun Renstra sebesar 1 inovasi. Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) tidak dapat di perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dikarekana tidak terpat publikasi terkait Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) yaitu adanya komitmen dari berbagai pihak pada Bapperida Kota Bogor baik dari pimpinan maupun pegawai untuk menciptakan inovasi dengan kematangan >100, serta adanya bimbingan teknis terkait Indeks Inovasi Daerah kepada seluruh perangkat daerah yang dilaksanakan sebanyak 4 kali pada bulan Februari 2025, Mei 2025, Oktober 2025, dan Desember 2025, selain itu dilaksanakan juga pendampingan khusus kepada seluruh Perangkat yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2025. Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan nilai kematangan inovasi pada Bapperida Kota Bogor adalah terkait pendokumentasian inovasi yang masih belum tertata dengan baik sehingga kurang maksimalnya pemenuhan bukti dukung pada saat dilaksanakan penilaian. Dalam rangka mengakselerasi inovasi lingkup Bapperida Kota Bogor tahun 2026 diperlukan adanya penertiban dalam penataan dokumentasi dan pendampingan terkait penyusunan kelengkapan bukti dokung dalam pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID).

Capaian kinerja Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) didukung oleh 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.230.260.960 dengan realisasi sebesar Rp. 1.019.819.140, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 17.11% atau setara dengan Rp. 210.441.820.

1.4 Kepatuhan Pegeloaan Keuangan



Kepatuhan Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya akuntabilitas Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor, Kepatuhan Pengelolaan ini merukapakan indikator yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Bogor, hasil pengukuran yang dilaksanakan tahun 2025, Kota Bogor mendapatkan nilai IPKD sebesar 71.0352 poin, dengan rincian indeks per dimensi sebagai berikut :

No	Dimensi	Indeks
1	Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	1.315
2	Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD	86.57
3	Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	14.063
4	Dimensi Penyerapan Anggaran	20
5	Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	8
6	Dimensi Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	10

Rincian Indeks per-dimensi IPKD Kota Bogor tahun 2025

Sedangkan untuk mendapatkan hasil pengukuran kepatuhan pengelolaan keuangan, telah ditetapkan 5 indikator penilaian yaitu :

- Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu;
- Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan;
- Kepatuhan terhadap anggaran;
- Realisasi anggaran terhadap DPA; dan
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil pengkuran kepatuhan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor sesuai dengan surat Badan Keuangan dan Aset Daerah nomor 000/413-Sekret tanggal 30 Januari 2026 perihal Hasil Penilaian Indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, Capaian kepatuhan pengelolaan keuangan Bapperida Kota Bogor tahun 2025 sebesar **96.16%** dengan persentase yang di peroleh sebesar **91.35%** dari target yang di tetapkan sebesar 95%, untuk rincian nilai dari 5 indikator penilaian sebagai berikut :

No	Indikator	Nilai (%)
1	Penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu	100
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan	100
3	Kepatuhan terhadap anggaran	62.5
4	Realisasi anggaran terhadap DPA	94.24
5	Transparansi pengelolaan keuangan daerah	100

Rincian nilai indikator penilaian kepatuhan pengelolaan keuangan

Dari kelima rincian indikator pengukuran pengelolaan keuangan daerah tersebut terdapat 3 indikator yang secara langsung mendukung untuk pencapaian dimensi pada pengukuran IPKD Kota bogor, indikator tersebut yaitu:

- Indikator kepatuhan terhadap anggaran Bapperida mendukung ketercapaian dimensi 1 (Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran).
- Indikator Realisasi anggaran terhadap DPA Bapperida mendukung ketercapaian dimensi 4 (penyerapan anggaran).

- c. Indikator Transparansi pengelolaan keuangan daerah Bapperida mendukung ketercapaian dimensi 3 (Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah).

kepatuhan pengelolaan keuangan ini merupakan indikator baru yang tertuang pada Renstra Bapperida tahun 2025-2026 dan baru mulai di ukur di tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian kepatuhan pengelolaan keuangan belum mencapai target dimana capaiannya sebesar 97.73% dengan target yang di tetapkan sebesar 95%. Nilai kepatuhan pengelolaan keuangan Bapperida masih berada di atas rata-rata nilai kepatuhan pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah Kota Bogor sebesar **3.54%** poin, dimana nilai rata-rata kepatuhan pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah Kota Bogor sebesar 87.81% poin. kepatuhan pengelolaan keuangan tidak dapat di perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dikarekana tidak terpat publikasi terkait kepatuhan pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Faktor yang mendukung pencapaian kepatuhan pengelolaan keuangan yaitu tertibnya penyampaian pengelolaan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu dan adanya rekonsiliasi keuangan dan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor setiap bulan, serta terlaksananya adanya verifikasi setiap pelaksanaan pengadministrasian keuangan di Bapperida Kota Bogor. Penyebab gagalnya pencapaian indikator kinerja ini adalah rendahnya nilai persentase kepatuhan anggaran, dari hasil pengukuran nilai persentase kepatuhan anggaran, Bapperida Kota Bogor hanya mendapatkan nilai sebesar 62.50%, nilai ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran yang menyebabkan adanya perbedaan cukup signifikan antara RKPD dan Renja dengan APBD. Dalam rangka akselerasi kepatuhan pengelolaan keuangan Bapperida Kota Bogor tahun 2026 diperlukan adanya evaluasi kembali terkait kekesuaian antara RKPD dan Renja dengan APBD.

Capaian kinerja kepatuhan pengelolaan keuangan didukung oleh 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.005.905.372 dengan realisasi sebesar Rp. 14.289.275.640.

1.5 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita



Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya akuntabilitas Keuangan di Lingkup Bapperida Kota Bogor, tindak lanjut rekomendasi ini merupakan kewajiban hukum pejabat/entitas yang diperiksa untuk melaksanakan perbaikan, memberikan jawaban, atau penjelasan atas temuan audit BPK/ITDA yang bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara/Daerah. Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA merupakan indikator yang mendukung ketercapaian IPKD untuk dimensi 6 (Opini Badan Pemeriksa Keuangan), dari hasil rekapitulasi pemutakhiran data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BKP RI dan Indpektorat Daerah Kota Bogor capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK/ITDA Bapperida Kota Bogor tahun 2025 sebesar **95%** dari target yang ditetapkan sebesar 100%, capaian ini tidak mengalami peningkatan atau sama dengan capaian pada tahun 2024. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA belum mencapai target dimana capaiannya sebesar 95% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dikarenakan tidak terpat publikasi terkait persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Faktor yang mendukung pencapaian kepatuhan pengelolaan keuangan yaitu tertibnya penyampaian pengelolaan keuangan yang dilaporkan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ada dan adanya rekonsiliasi keuangan dan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor setiap bulan, serta komitmen dari pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK dan Inspektorat Kota Bogor. Penyebab gagalnya pencapaian indikator kinerja ini karena masih persentase tindak lanjut BPK yang masih 90%, persentase ini disebabkan karena masih terdapat 1 hasil rekomendasi yang belum terselesaikan dari tahun 2024 yaitu pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan program mobilitas penduduk dan penataan permukiman kumuh, rekomendasi tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menyusun “Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) Kota Bogor Tahun 2025”, tetapi belum ada hasil telaahan dari BPK. Dalam rangka mengakselerasi capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA Bapperida Kota Bogor tahun 2026 diperlukan adanya koordinasi dengan Inspektorat agar rekomendasi yang telah dilaksanakan cepat di telaah oleh BPK.

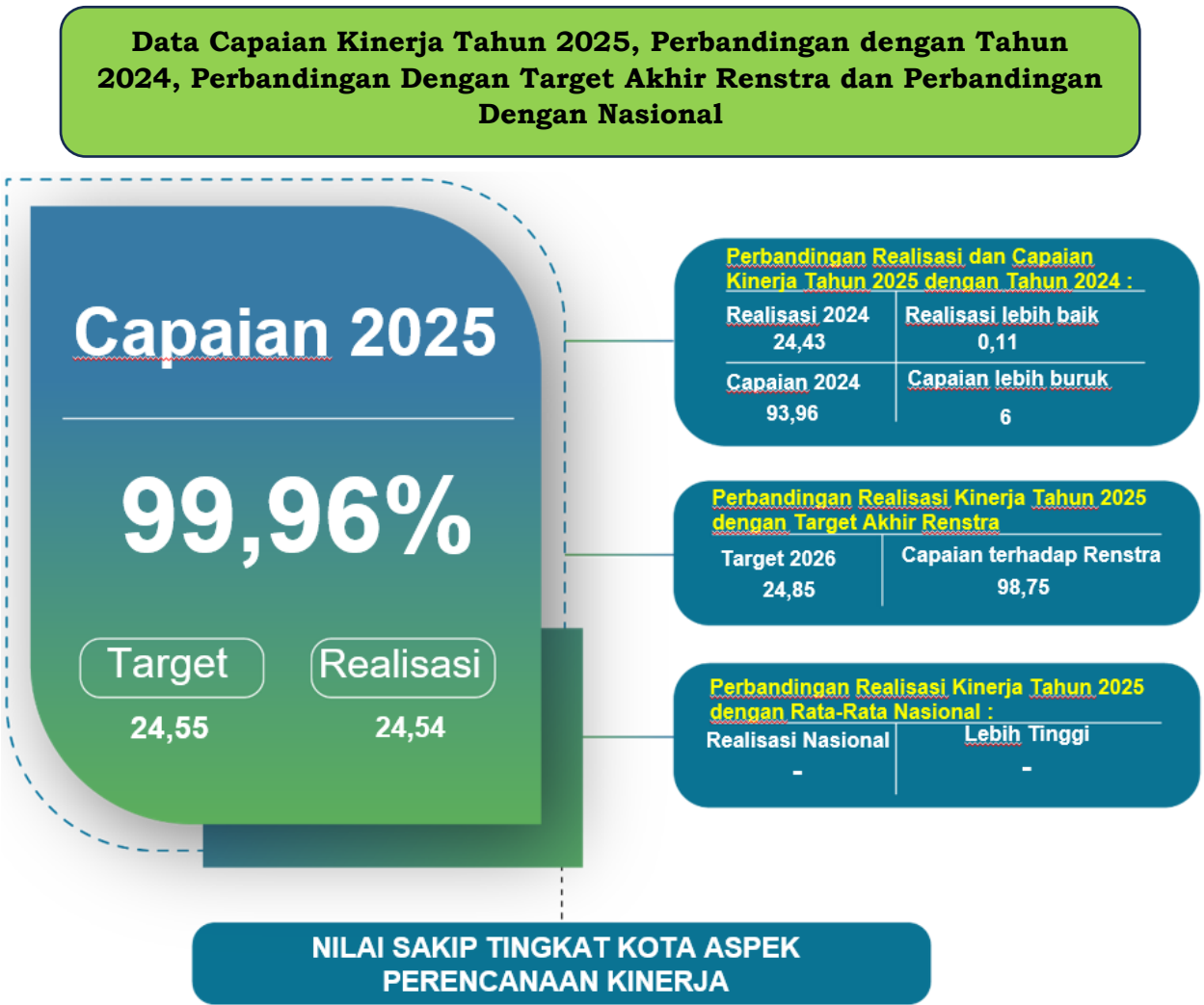
Capaian persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK/ITDA didukung oleh 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 15.005.905.372 dengan realisasi sebesar Rp. 14.289.275.640.

2) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja, dan Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja, dalam pencapaiannya di dukung oleh 2 Program dan 6 Kegiatan yaitu:

Sasaran	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	
Indikator Sasaran	Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	
	Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	
Program	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Program	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang (Per 10.000 penduduk)	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	Persentase Ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA
	Persentase Ketercapaian target sasaran perencanaan pembangunan daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek Pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Perekonomian dan SDA
		Persentase ketercapaian target Program Pembangunan Daerah urusan Perekonomian dan SDA
Kegiatan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rata-rata nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan
	Analisis Data dan Informasi Pemrintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja pada Perangkat Daerah lingkup urusan Infrastruktur dan Kewilayahan
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketercapaian target Program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

2.1 Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Perencanaan Kinerja



Nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, evaluasi perencanaan kinerja ini bertujuan untuk memastikan setiap instansi memiliki panduan kerja yang jelas dalam mencapai sasaran strategisnya secara efisien. Sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bogor Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) nomor B/233/AA.05/2025, capaian AKIP aspek perencanaan kinerja Kota Bogor sebesar **99.96%** dengan nilai AKIP aspek perencanaan kinerja sebesar 24.54 poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 24.55 poin, capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 6% dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 93.96% dengan nilai AKIP aspek perencanaan kinerja sebesar 24.43 poin. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), Nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja belum mencapai target dimana capaiannya sebesar 98.75% dengan target yang ditetapkan sebesar 24.85 poin, sedangkan jika dibandingkan dengan nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja Provinsi Jawa Barat, realisasi kota bogor masih berada di bawah Provinsi Jawa Barat sebesar 2.11 poin dimana realisasi nilai SAKIP aspek perencanaan kinerja Provinsi Jawa Barat sebesar 26.65 poin. Nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja tidak dapat dibandingkan dengan

Nasional dikarenakan tidak terpat publikasi terkait Nilai SAKIP tingkat aspek perencanaan kinerja Nasional.

Faktor yang mendukung pencapaian nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja yaitu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan perbaikan kinerja dan melaksanakan tindak lanjut yang direkomendasikan dalam Evaluasi AKIP Kota Bogor di tahun n-1 oleh Kemenpan RB, serta adanya bimbingan dari Provinsi Jawa Barat dan Kemenpan RB dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi. Sedangkan penyebab gagalnya pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan :

- a. Terdapat rumusan sasaran strategis PD yang belum berorientasi outcome atau bersifat kegiatan/output, dan indikator kinerja PD yang belum memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan belum sesuai pada levelnya.
- b. Terdapat indikator kinerja yang belum berorientasi hasil/*outcome* di level PD dan penjenjangan kinerja dan penetapan kinerja yang kurang tepat
- c. Metadata Indikator Tujuan, Sasaran, dan Program RPJMD Tahun 2025–2029 serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 belum disosialisasikan secara berkala, sehingga pemahaman PD terhadap dokumen perencanaan belum merata.
- d. *Cascading* kinerja yang disusun belum menjelaskan faktor pendorong (*why factor*) yang mendasari perumusan sasaran dan pemilihan indikator kinerja.
- e. Penjenjangan kinerja sebagian PD masih belum mempertimbangkan cross-cutting kinerja dengan unit/instansi lain.
- f. Penetapan rencana aksi yang disusun pada sebagian PD masih belum sepenuhnya menjabarkan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi yang selaras untuk pencapaian kinerja utama yang telah ditetapkan pada PK.

Dalam rangka mengakselerasi capaian nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja Kota Bogor tahun 2026 diperlukan adanya reviu kembali dokumen perencanaan yang ada dan melaksanakan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tahun berikutnya serta melakukan sosialisasi metadata indikator Tujuan, Sasaran dan Program RPJMD Tahun 2025-2029.

Capaian Nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja didukung oleh 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.009.961.800 dengan realisasi sebesar Rp. 2.904.607.000.

2.2 Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja



Nilai SAKIP tingkat kota aspek pengukuran kinerja merupakan salah satu dari indikator keberhasilan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, evaluasi pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai efektivitas instansi dalam membandingkan realisasi kinerja dengan target. Sesuai dengan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bogor Tahun 2025 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) nomor B/233/AA.05/2025, capaian AKIP aspek pengukuran kinerja Kota Bogor sebesar **100.28%** dengan nilai AKIP aspek pengukuran kinerja sebesar **25.12** poin dari target yang telah ditetapkan sebesar 25.05, capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan pada dokumen Renstra sebelumnya tidak terdapat indikator ini, untuk realisasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0.19 point dari realisasi pada tahun 2024 sebesar 24.93 poin. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), Nilai SAKIP tingkat kota aspek pengukuran kinerja belum mencapai target dimana capaiannya sebesar 99.29%

dengan target yang di tetapkan sebesar 25.3 poin, sedangkan jika di bandingkan dengan nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja Provinsi Jawa Barat, realisasi kota bogor masih berada di bawa Provinsi Jawa Barat sebesar 2.26 poin dimana realisasi nilai SAKIP aspek pengukuran kinerja Provinsi Jawa Barat sebesar 27.38 poin. Nilai SAKIP tingkat kota aspek pengukuran kinerja tidak dapat di perbandingan dengan Nasional dikarenakan tidak terpat publikasi terkait Nilai SAKIP tingkat aspek perencanaan kinerja Nasional

Faktor yang mendukung pencapaian nilai SAKIP tingkat kota aspek perencanaan kinerja yaitu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan perbaikan kinerja dan melaksanakan tindak lanjut yang direkomendasikan dalam Evaluasi AKIP Kota Bogor di tahun n-1 oleh Kemenpan RB, serta adanya bimbingan dari Provinsi Jawa Barat dan Kemenpan RB dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi. Sedangkan faktor penghambat pencapaian indikator kinerja ini dikarenakan :

- a. Dokumen IKU sebagian PD belum dilengkapi dengan definisi operasional dan formulasi perhitungan untuk menjelaskan cara mengukur keberhasilan indikator tersebut.
- b. Aplikasi SADAYA (Sistem Akuntabilitas Daerah yang Terintegrasi) masih dalam proses pengisian dokumen perencanaan kinerja, sehingga masih ditemukan rencana aksi yang belum terisi serta target pengukuran kinerja bernilai 0.
- c. Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
- d. Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian *reward and punishment*, perubahan strategi dan target kinerja di Pemerintah Kota Bogor.

Dalam rangka mengakselerasi capaian nilai SAKIP tingkat kota aspek pelaporan kinerja Kota Bogor tahun 2026, perlu melaksanakan reviu kembali pada rencana aksi yang telah di susun oleh masing-masing Perangkat Daerah agar mendukung perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong seluruh Perangkat Daerah agar secara berkala melakukan pengisian data pada aplikasi SADAYA.

Capaian kinerja Nilai SAKIP tingkat kota aspek pengukuran kinerja didukung oleh 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 172.738.800 dengan realisasi sebesar Rp. 139.246.600, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 11.39% atau setara dengan Rp. 33.942.200.

3) Sasaran Strategis Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah

Dalam pelaksanaannya sasaran ini di ukur dengan 3 indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Perangkat Daerah dalam pencapaiannya di dukung oleh 1 Program dan 3 Kegiatan yaitu:

Sasaran	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah
Indikator Sasaran	Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan
	Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan
	Persentase inovasi yang berkelanjutan
Program	Penelitian dan Pengembangan
Indikator Program	Persentase Perangkat Daerah yang menciptakan inovasi baru pada tahun n
	Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan
	Persentase rencana kebijakan baru yang mendapatkan rekomendasi
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kebijakan yang di tindak lanjuti oleh perangkat daerah
Kegiatan	Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaran Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi

3.1 Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan

Data Capaian Kinerja Tahun 2025, Perbandingan dengan Tahun 2024, Perbandingan Dengan Target Akhir Renstra dan Perbandingan Dengan Nasional



Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan merupakan salah satu dari indikator keberhasilan termemanfaatkannya hasil litbang jirap sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kota Bogor yang pada tahun 2025 mendapatkan predikat "**Sangat Baik**". Dari hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, hasil capaian persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan sebesar **161.50%** dimana realisasinya sebesar **16.15%** dari target yang telah ditetapkan sebesar 10%, realisasi ini didapat dari hasil penilaian IKK yang dilaksanakan pada tahun 2025 dimana dari seluruh kebijakan yang dinilai terdapat 21 Kebijakan dengan nilai >65 poin. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini tidak digunakan di tahun 2024, sedangkan jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian telah melebihi target akhir sebesar **161.50%** dengan target yang ditetapkan sebesar 10%. Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dikarenakan tidak terdapat publikasi terkait Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan yaitu adanya bimtek terkait peningkatan indeks kualitas kebijakan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor. Sedangkan faktor penghambat yang menyebabkan tidak terpenuhinya formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan yaitu kurangnya data dukung yang disediakan saat pelaksanaan penilaian. Dalam rangka mengakselerasi untuk memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Kota Bogor tahun 2026 diperlukan adanya pendampingan kepada setiap perangkat daerah dan perlu adanya penunjukan tim untuk melaksanakan pengukuran IKK di setiap Perangkat Daerah lingkup Kota Bogor.

Capaian kinerja Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan didukung oleh 2 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.230.260.960 dengan realisasi sebesar Rp. 1.019.819.140, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 17.11% atau setara dengan Rp. 210.441.820.

3.2 Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan



Persentase evaluasi kemanfaatan kebijakan merupakan salah satu dari indikator keberhasilan termanaatkannya hasil litbang jirap sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kota Bogor yang pada tahun 2025 mendapatkan prediakat ”**Sangat Baik**”. Dari hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, hasil capaian persentase evaluasi kemanfaatan kebijakan sebesar **142.90%** dimana realisasinya sebesar **14.29%** dari target yang telah di tetapkan sebesar 10%, realisasi ini didapat dari hasil evaluasi yang dibaut pada tahun 2023 dalam JDIH Kota Bogor, dari total 70 Kebijakan terdapat 10 kebijakan yang di evaluasi oleg Bapperida Kota Bogor. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini tidak digunakan di tahun 2024, sedangkan jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian telah melebihi target akhir sebesar **142.90%** dengan target yang ditetapkan sebesar 10%. Indikator ini tidak dapat di perbandingan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dikarekana tidak terpat publikasi terkait Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Persentase evaluasi kemanfaatan kebijakan yaitu adanya bimtek terkait peningkatan indeks kualitas kebijakan kepada seluruh Perangkat Daerah di Kota Bogor. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat saat pelaksanaan survey terkait kemanfaata kebijakan yang akan di evaluasi. Dalam rangka mengakselerasi untuk pelaksanaan evaluasi kemanfaatan kebijakan Kota Bogor tahun 2026 diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan evaluasi kemanfaatan kebijakan Kota Bogor.

Persentase evaluasi kemanfaatan kebijakan didukung oleh 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 42.945.800 dengan realisasi sebesar Rp. 42.920.300, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 0.06% atau setara dengan Rp. 25.500.

3.3 Persentase Inovasi yang Berkelanjutan



Persentase inovasi yang berkelanjutan merupakan salah satu dari indikator keberhasilan termanfaatkannya invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah. Indikator ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator Indeks Inovasi Daerah (IID), dimana sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang

Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Kota Bogor mendapatkan nilai indeks sebesar 60.41 poin atau kategori "Inovatif". Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, hasil capaian persentase inovasi yang berkelanjutan sebesar **102.03%** dimana realisasinya sebesar **73.46%** dari target yang telah ditetapkan sebesar 72%, realisasi ini didapat dari hasil evaluasi inovasi yang ada pada perangkat daerah Kota Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2025, dari total 471 Inovasi yang ada dari tahun 2014 s.d. tahun 2025 terdapat 346 inovasi yang masih berlanjut, sisanya sebanyak 125 inovasi pada perangkat daerah tidak berlanjut. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini tidak digunakan di tahun 2024, sedangkan untuk realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar **3.54%** dari tahun 2024 dimana realisasi tahun 2024 sebesar 69.92%. Jika dilihat dari persepektif perencanaan jangka menengah (Renstra), capaian telah melebihi target akhir sebesar **100.63%** dari target yang ditetapkan sebesar 73%. Indikator ini tidak dapat di perbandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional dikarenakan tidak terpat publikasi terkait Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Faktor keberhasilan yang keberlanjutan inovasi yaitu adanya bimbingan terkait inovasi dan adanya komitmen dari Perangkat daerah dengan ditetapkannya IKU terkait inovasi, serta adanya reward bagi pegawai yang memiliki penerapan inovasi yang baik, reward tersebut di berikan pada saat pelaksanaan Bogor Innovation Award (BIA) dan saat pemilihan pegawai berprestasi yang ke duanya dilaksanakan setahun sekali, sedangkan faktor yang menghambat keberlanjutan inovasi perangkat daerah adalah karena masih terdapat masalah terkait SDM, dimana tidak adanya transfer informasi antara inovator dengan pegawai lainnya terkait inovasi yang dapat menyebabkan inovasi tersebut tidak berlanjut ketika inovator mendapatkan promosi atau dirotasi ke Perangkat Daerah Lain. Dalam rangka mengakselerasi keberlanjutan inovasi Perangkat Daerah di lingkup Kota Bogor tahun 2026 diperlukan bimbingan terkait penerapan inovasi serta mendorong setiap inovator untuk melaksanakan transfer knowlage kepada pegawai di perangkat daerahnya.

Capaian kinerja Persentase Inovasi yang Berkelanjutan didukung oleh 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 472.973.300 dengan realisasi sebesar Rp. 454.395.363, sehingga terdapat efisiensi sumber daya yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja di atas sebesar 3.93% atau setara dengan Rp. 18.577.937.

B. ANALISIS EFISIENSI

Pada Tahun 2025 Bapperida Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 23.771.971.972.- (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.402.827.307.- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar 94,24%, realisasi tersebut masuk kedalam kategori **“Sangat Baik”**. Rincian Anggaran per sasaran pada Bapperida Kota Bogor Tahun 2025 per 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 12
Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU	REALISASI	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bappeda Kota Bogor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.478.650.272	18.327.831.530	94.09
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.344.562.400	1.275.246.800	94.84
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.838.138.200	1.768.606.800	96.22
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Penelitian dan Pengembangan	1.110.621.100	1.031.142.177	92.84
TOTAL			23.771.971.972	22.402.827.307	94.24

Tabel 9 Rincian Anggaran Per Sasaran Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat realisasi anggaran pada setiap sasaran di atas 90% dimana realisasi tersebut termasuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Pada pelaksanaannya terdapat efisiensi anggaran yang rata-rata merupakan hasil efisiensi pada belanja pengadaan barang dan jasa. Sasaran dan program di dukung oleh kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

NO	URAIAN / KEGIATAN/SUB		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Rp	Rp	(%)
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.406.300	21.104.600	98.59
	1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.406.800	14.109.600	97.94
	2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.999.500	6.995.000	99.94
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		15.005.905.372	14.289.275.640	95.22
	1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.919.444.172	14.202.822.040	95.20

NO	URAIAN / KEGIATAN/SUB		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Rp	Rp	(%)
	2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	86.461.200	86.453.600	99.99
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		925.142.924	764.827.686	82.67
	1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.037.500	9.167.490	91.33
	2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.157.700	76.134.470	92.67
	3.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.578.624	23.979.700	83.91
	4.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.541.700	16.734.500	43.42
	5.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.622.400	8.228.300	77.46
	6.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	755.205.000	630.583.226	83.50
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.265.895.700	1.235.479.400	97.60
	1.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	616.834.000	614.680.000	99.65
	2.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	43.549.000	43.180.000	99.15
	3.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	605.512.700	577.619.400	95.39
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.176.788.743	1.017.155.913	86.43
	1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.385.952	143.984.804	89.77
	2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.016.402.791	873.171.109	85.91
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.083.511.233	999.988.291	92.29
	1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.311.149	232.588.044	82.68
	2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.732.084	111.006.650	76.70
	3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	657.468.000	656.393.597	99.84
7	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		1.198.021.700	1.157.165.200	96.59
	1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	53.621.200	53.401.200	99.59
	2.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3.768.800	3.700.000	98.17
	3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	388.052.700	379.536.000	97.81
	4.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	752.579.000	720.528.000	95.74

NO	URAIAN / KEGIATAN/SUB		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Rp	Rp	(%)
8	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		72.111.600	70.635.000	97.95
	1.	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.000.000	3.600.000	90.00
	2.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	68.111.600	67.035.000	98.42
9	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		74.429.100	47.446.600	63.75
	1.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	20.330.100	1.175.000	5.78
	2.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	54.099.000	46.271.600	85.53
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.838.138.200	1.768.606.800	96.22
10	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1.000.803.600	997.172.800	99.64
	1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.000.803.600	997.172.800	99.64
11	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		136.181.700	111.280.000	81.71
	1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	37.872.000	19.480.000	51.44
	2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.700.000	-	0.00
	3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2.700.000	-	0.00
	4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	92.909.700	91.800.000	98.81
12	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		701.152.900	660.154.000	94.15
	1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1.800.000	1.800.000	100.00
	2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.700.000	-	0.00
	3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2.700.000	-	0.00
	4.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	669.155.900	636.882.000	95.18

NO	URAIAN / KEGIATAN/SUB		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
			Rp	Rp	(%)
	5.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	24.797.000	21.472.000	86.59
13	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		382.097.100	332.139.714	86.93
	1.	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	60.285.800	23.574.000	39.10
	2.	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	205.891.600	199.915.314	97.10
	3.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	72.973.900	65.730.100	90.07
	4.	Sub Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	42.945.800	42.920.300	99.94
14	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		255.550.700	244.607.100	95.72
	Sub Kegiatan				
	1.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	255.550.700	244.607.100	95.72
Kegiatan					
15	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		472.973.300	454.395.363	96.07
	1.	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	440.866.100	428.601.363	97.22
	2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	32.107.200	25.794.000	80.34

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Sumber: Laporan Keuangan Bapperida Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2025. LKIP menggambarkan Kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

LKIP digunakan sebagai dasar untuk melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan Organisasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada prinsipnya merupakan alat pertanggungjawaban dari unit organisasi yang lebih rendah kepada unit organisasi yang lebih tinggi yang menonjolkan akuntabilitas manajerialnya. LKIP menjadi alat ukur bagi keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan Renstra perangkat daerah dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Kota Bogor Tahun 2025 disusun melalui pengukuran data kinerja yang melibatkan seluruh elemen di lingkungan Bappeda Kota Bogor. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah pembangunan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sehingga memposisikan laporan akuntabilitas kinerja menjadi bagian integral dalam siklus perencanaan pembangunan karena informasi hasil evaluasi kinerja yang merupakan bagian inti dari laporan akuntabilitas kinerja merupakan *critical point* yang penting dalam melakukan perbaikan dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya. Melalui evaluasi, dapat diketahui sebab keberhasilan dan kegagalan kegiatan Bappeda yang selanjutnya akan dipertanggungjawabkan dalam sebuah mekanisme yang ada.

Penentuan variabel sebagai indikator kinerja dan pemilihan parameter yang tepat dalam sebuah pengukuran kinerja, akan didapat pelaksanaan evaluasi kinerja yang akuntabel sehingga memberikan kontribusi positif bagi optimalisasi kinerja Bappeda Kota Bogor di tahun berikutnya.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik Bappeda Kota Bogor terus menerus mengupayakan perbaikan kinerja. Upaya Perbaikan yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim untuk melaksanakan pendampingan, *coaching clinic*, asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan hasil penjenjangan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan perangkat daerah secara berkala;
3. Memperkuat koordinasi antar bidang lingkup Bapperida serta kolaborasi dengan mitra perangkat daerah.

A. KESIMPULAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 3 sasaran strategis dengan dan 10 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu:

Tabel 14
Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dan Keuangan di Lingkup Bappeda Kota Bogor	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	89.88	90.90	101.13	Sangat Baik
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah	Nilai	90.5	93.01	102.77	Sangat Baik
		Kepatuhan Pengeloaan Keuangan	Persen	95	92.85	97.73	Sangat Baik
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	Persen	100	95.00	95.00	Sangat Baik
		Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100)	Inovasi/ Tahun/PD	1	1	100.00	Sangat Baik
2	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja	Niali	25.05	25.12	100.28	Sangat Baik
		Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja	Nilai	24.55	24.54	99.96	Sangat Baik
3	Termanfaatkannya hasil litbang jirap, serta invensi dan inovasi sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan	Persen	10	16.15	161.50	Sangat Baik

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Kriteria
		Persentase Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan	Persen	10	14.29	142.90	Sangat Baik
		Persentase inovasi yang berkelanjutan	Persen	72	73.46	102.03	Sangat Baik
Rata-rata Tingkat Ketercapaian						99.11	Sangat Baik

Tabel 11 Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas rata-rata ketercapaian IKU Bapperida Kota Bogor Tahun 2025 sebesar 99.11%, dari Ke 10 indikator kinerja tersebut terdapat 7 indikator kinerja sasaran yang capaian targetnya ≥100%, adapun indikator kinerja yang mencapai target yaitu:

1. Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah (101.13%);
2. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah (102.77%);
3. Jumlah Inovasi perangkat daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi lebih > 100) (100%);
4. Indeks Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah (102,76%);
5. Nilai Sakip Tingkat Kota Aspek Pengukuran Kinerja (100.28%);
6. Persentase kebijakan yang memenuhi formulasi kebijakan dalam instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (161.50%);
7. Persentase inovasi yang berkelanjutan (102.03%).

Sedangkan 3 indikator kinerja sasaran yang capaian targetnya <100% adalah:

1. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan (97.73%);
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda (95%);
3. Nilai SAKIP Tingkat Kota aspek Perencanaan Kinerja (99.96%).

Dari hasil evaluasi capaian kinerja pada tahun 2024 terdapat 2 indikator kinerja sasaran yang capaian targetnya <100, yaitu (1) Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota dengan nilai sebesar 24,93 (93.96%); dan (2) Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target dengan nilai sebesar 70% (83.86%), ketidak tercapaian tersebut disebabkan karena faktor -faktor sebagai berikut:

Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota :

1. Rumusan sasaran strategis serta indikator kinerja di perangkat daerah yang belum berorientasi hasil dan belum merepresentasikan tugas, fungsi dan isu strategis perangkat daerah.
2. Penjenjangan kinerja perangkat daerah belum belum mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* atas pencapaian kinerja, sehingga belum menggambarkan sebab akibat.
3. Penjenjangan kinerja Sebagian perangkat daerah belum mempertimbangkan *cross-cutting* kinerja dengan unit/instansi lain.

Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target :

1. capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, pembangunan manusia, infrastruktur dan kewilayahan dimana capaian bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada tahun 2024 sebesar 88,67% dengan realisasinya sebesar 72,68% dari target sebesar 81,88%, sedangkan capaian bidang infrastruktur dan kewilayahan pada tahun 2024 sebesar 98,18% dengan realisasi sebesar 71,67% dari target sebesar 73%, ketidak tercapaian ini disebabkan karena masih terdapat Sub Kegiatan yang keluarannya (aktivitas Kegiatannya) tidak mendukung terhadap pencapaian Kegiatan dan Program, sehingga menyebabkan tidak tercapainya target Kegiatan dan Program yang mendukung sasaran strategis/ IKU tersebut. Dari ketidak tercapaian yang telah di sebutkan di atas menyebabkan 9 indikator tidak tercapai, 21 Indikator yang tercapai dan 1 indikator belum terdapat datanya dari 31 indikator yang menjadi target dalam RPJMD Kota Bogor.

Pada Tahun 2025 Bapperida Kota Bogor mengelola anggaran sebesar Rp. 23.771.971.972.- (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribuan Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.402.827.307.- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribuan Tiga Ratus Tujuh Rupiah) atau sebesar 94,24%, realisasi tersebut masuk kedalam kategori **“Sangat Baik”**. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.369.144.665.- (Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribuan Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 5.76%.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bapperida, dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia. Setelah itu baru ditetapkan sasaran yang ingin dicapai mengacu pada dokumen RENSTRA/RENJA, yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat uraian sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai serta anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing target kinerja sasaran.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Demi terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung ketercapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan dokumen perencanaan melalui proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dan

Perubahan RKPD Tahun 2026 dengan memperhatikan rekomendasi LHE SAKIP 2025.

2. Melaksanakan penyelarasan dalam penyusunan logical frame work dan penjenjangan kinerja Tingkat Kota dan penjenjangan kinerja tingkat Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
3. Melaksanakan pendampingan dan Asistensi serta penyelarasan dokumen RKPD tahun 2027 dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun 2026 dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah 2026.
4. Secara internal melakukan perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bidang sehingga proses perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja serta pelaporan lingkup Bapperida dapat terlaksana dengan optimal.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor kepada publik baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah berperan dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bogor.